

DESAIN PROSES BISNIS ALUR PENGGAJIAN DALAM SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN TENAGA KONTRAK (SIMPEG-TK) PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TABANAN

I PUTU BUDA SUYASA
I MADE AGUS WIDIANA PUTRA
PUTU DIAN KARMANA

budasuyasa@gmail.com, imadeagusclass@gmail.com, dk.777.ary@gmail.com
Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Tabanan

ABSTRAK

Masalah Gaji atau Imbalan Kerja bagi Karyawan merupakan hal yang sensitif dan berpengaruh langsung pada produktivitas kerja individu. Sistem penggajian suatu instansi sangat mempengaruhi keberadaan pekerja dan instansi. Penerapan sistem penggajian yang tepat dapat memberikan kepuasan bagi pekerja maupun instansi, Hal ini dapat berpengaruh pada kegiatan operasional instansi, sehingga siklus penggajian pada instansi sangat penting. Dalam penggajian, ada beberapa proses yang dilakukan dari pengajuan sampai dengan pencairan gaji, untuk itu dalam membuat suatu sistem informasi penggajian diperlukan suatu pemetaan proses bisnis. Pemetaan proses bisnis yang dilakukan juga dapat menjadi dasar dalam penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur), karena proses yang didokumentasikan di dalam SOP disusun berdasarkan proses bisnis yang telah akan dipetakan.

Kata Kunci : Gaji, Bisnis, Sistem Informasi

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat ini, penerapan atau penggunaan teknologi informasi semakin berkembang, hal ini dapat kita lihat dari perkembangan alat-alat elektronik dan juga alat-alat komunikasi yang kian hari kian meningkat penggunaannya di masyarakat, dan juga semakin banyak ragam dan jumlah produk tersebut beredar di masyarakat. Selain itu, penerapan teknologi informasi juga besar pengaruhnya di dalam kehidupan manusia, contohnya seperti penggunaan gadget handphone yang sangat dekat rasanya dengan kehidupan sehari-hari kita yang mana dulunya hanya dipergunakan sebagai media komunikasi, kini juga dapat dipergunakan sebagai sarana dalam memperoleh informasi secara digital dan juga dapat dipergunakan sebagai sarana transaksi seperti melakukan transaksi bank digital atau transaksi jual-beli secara online (e-banking, e-commerce).

Berkembang pesatnya teknologi juga berpengaruh terhadap praktik bisnis dan sistem akuntansi didalam pemerintahan. Itu dikarenakan semakin meningkatnya informasi yang harus dihasilkan oleh perusahaan yang dalam hal ini adalah Lembaga Pemerintahan. Informasi tersebut sangat diperlukan untuk membuat perencanaan yang efektif, pengawasan dan pengambilan keputusan oleh manajemen serta sebagai pertanggungjawaban. Dengan adanya teknologi informasi, perusahaan akan dengan mudah dan cepat untuk memperoleh suatu informasi atau bertukar informasi. Selain itu dengan adanya teknologi

informasi ini, manfaat yang didapat akan sangat besar bagi perusahaan yang menggunakannya.

Untuk mendapatkan informasi tersebut perlu adanya sistem yang mengolah data menjadi sebuah sistem informasi yang berharga. Salah satu sistem informasi yang penting di dalam perusahaan adalah sistem informasi penggajian. Sistem informasi ini sering disebut yang paling vital karena gaji adalah sesuatu yang biasa menjadi penentu kesejahteraan perusahaan. Penggajian merupakan kompensasi secara langsung yang diberikan kepada pegawai sebagai balas jasa atas hasil kerja yang telah dilakukan. Pada pelaksanaan pembayaran gaji pegawai harus dilaksanakan secara profesional dengan maksud agar terciptanya hubungan timbal balik yang baik antara instansi dan karyawan. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dapat dijalankan dengan selaras dan seimbang.

Masalah Gaji atau Imbalan Kerja bagi Karyawan merupakan hal yang sensitif dan berpengaruh langsung pada produktivitas kerja individu. Sistem penggajian suatu instansi sangat mempengaruhi keberadaan pekerja dan instansi. Penerapan sistem penggajian yang tepat dapat memberikan kepuasan bagi pekerja maupun instansi, Hal ini dapat berpengaruh pada kegiatan operasional instansi, sehingga siklus penggajian pada instansi sangat penting. Dalam penggajian, ada beberapa proses yang dilakukan dari pengajuan sampai dengan pencairan gaji, untuk itu dalam membuat suatu sistem informasi penggajian diperlukan suatu pemetaan proses bisnis. Pemetaan proses bisnis yang dilakukan juga dapat

9. Pegawai kontrak yang sudah melakukan pengisian BPJS akan melakukan pengumpulan ke pihak bagian kepegawaian
10. Pihak bidang kepegawaian yang menerima data BPJS dari pihak tenaga kontrak akan dilakukan pengecekan data agar tidak ada data yang kurang
11. Setelah pihak bagian kepegawaian melakukan pengecekan, data BPJS akan di serah kan ke bagian keuangan untuk verifikasi data lebih lanjut
12. Jika verifikasi data telah selesai pihak bagian keuangan akan melakukan pembuatan SPM untuk pengajuan gaji pegawai kontrak
13. Hasil SPM akan di serahkan ke Kepala Dinas untuk di tandatangani agar bisa di proses lebih lanjut
14. Selanjutnya SPM akan di kembalikan ke bagian keuangan untuk di koreksi jika ada tandatangan Kepala Dinas yang belum di tandatangani
15. Pihak bagian keuangan akan memberikan nilai hasil keseluruhan gaji pegawai kontrak yang sudah di rekap ke bagian kepegawaian
16. Pihak Bagian kepegawaian yang menerima hasil rekap keseluruhan gaji pegawai kontrak akan melakukan penginputan ke aplikasi (e-gov) dan melakukan pencetakan dalam bentuk hardcopy
17. Hasil hardcopy dari data yang di input akan di serahkan ke bagian keuangan untuk di lakukan pengecekan
18. Setelah pengecekan berakhir oleh bagian keuangan, maka gaji pegawai kontrak akan langsung di serahkan

Dalam proses yang ada seperti pada Gambar 1, alur gaji pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan melalui alur yang cukup panjang. Dimulai dari Sub. Bagian Kepegawaian yang menginformasikan tentang pengisian absensi dan pemberian formulir gaji yang kemudian diserahkan ke masing-masing Divisi untuk dibagikan secara personal kepada tiap-tiap tenaga kontrak pada Divisi tersebut. Setelahnya para tenaga kontrak akan mengisi formulir dan juga membuat surat pengajuan gaji yang sudah ditandatangani sebelumnya dan kemudian surat/formulir tersebut akan diserahkan kembali kepada Sub. Bagian Kepegawaian untuk dikumpulkan secara serentak sebelum dikirim ke bagian keuangan. Data yang sudah terkumpul pada Sub. Bagian Kepegawaian kemudian akan diserahkan ke Sub. Bagian Keuangan untuk diverifikasi, hasil verifikasi tersebut kemudian akan diteruskan ke Sub. Bagian Kepegawaian untuk dibuatkan kuitansi dan juga berita acara pengujian (BAP). Pada alur ini sebenarnya terdapat beberapa proses yang cukup banyak, seperti pengembalian data jika terdapat kesalahan dan para tenaga kontrak yang memiliki kesalahan data akan dipanggil untuk memproses ulang data isian tersebut di Sub. Bagian Kepegawaian agar lebih cepat diverifikasi dan dikembalikan ke Sub. Bagian Keuangan untuk dicek kembali oleh Sub. Bagian Keuangan sebelum dikirimkan kembali ke

Sub. Bagian Kepegawaian untuk dibuatkan kuitansi dan berita acara pengujian. Hal ini sudah cukup memakan waktu dikarenakan dengan adanya suatu sistem kepegawaian yang sudah valid, tentu saja hal yang memakan waktu ini tidak akan menjadi sebuah problema yang terus berulang.

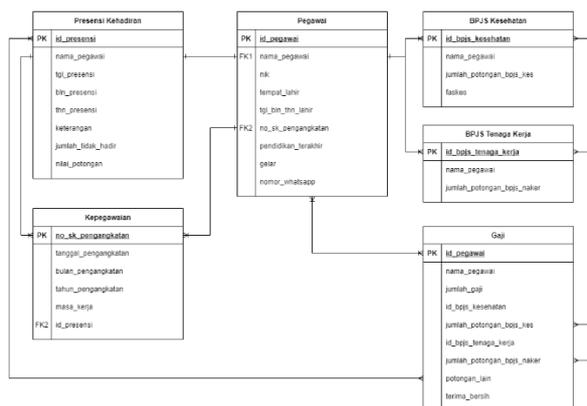
Selanjutnya setelah kuitansi dan berita acara pengujian telah dibuat oleh Sub. Bagian Kepegawaian, kemudian kuitansi dan BAP tersebut akan diserahkan ke Sub. Bagian Keuangan untuk pengecekan pembayaran BPJS (BPJS Keuangan dan BPJS Ketenagakerjaan). Data BPJS tersebut kemudian dicetak untuk diserahkan kepada tenaga kontrak untuk diisi dan ditandatangani secara manual. Data yang sudah diisi dan ditandatangani tersebut kemudian diserahkan ke Sub. Bagian Kepegawaian untuk diperiksa lalu hasil pemeriksaan tersebut kemudian akan diserahkan kepada Sub. Bagian Keuangan untuk dibuatkan SPM (Surat Perintah Membayar). SPM yang sudah tercetak tersebut kemudian akan diserahkan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. Kepala Dinas dalam sebuah organisasi pemerintahan adalah orang yang bertindak selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) atau pihak yang paling berwenang didalam mengesahkan pengeluaran dinas.

Dalam tahapan ini, ada tahapan proses dimana Kepala Dinas akan meminta pendataan baik dari Sub. Bagian Keuangan dan juga Sub. Bagian Kepegawaian untuk melaksanakan evaluasi atas pembayaran gaji, hal ini dilakukan secara rutin tiap bulannya untuk mengetahui sisa anggaran dan juga mengetahui kinerja para tenaga kontrak yang bekerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan. Setelah proses tersebut, dari Sub. Bagian Kepegawaian akan melaksanakan penginputan data pada aplikasi e-government guna mengirimkan informasi tentang jumlah pembayaran gaji dan juga jumlah pembayaran BPJS yang sudah ditentukan ke sistem e-government yang sudah ada sebelumnya yang akan diverifikasi oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lainnya yang membidangi anggaran daerah. Data yang sudah terproses tersebut setelah diverifikasi oleh OPD yang membidangi anggaran daerah kemudian akan dicetak, oleh Sub. Bagian Kepegawaian dan diserahkan kepada Sub. Bagian Keuangan untuk digandakan, data yang sudah digandakan tersebut kemudian diarsipkan, dan data aslinya akan diserahkan ke OPD yang membidangi anggaran daerah untuk diproses selanjutnya sebelum diserahkan ke lembaga keuangan (Bank) yang ditunjuk untuk mengalokasikan gaji tersebut ke masing-masing tenaga kontrak yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan.

Model Rancangan Sistem Informasi Kepegawaian
Berdasarkan penjelasan yang sudah diberikan sebelumnya, proses yang ada atau sedang berjalan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan saat ini masih manual dan memiliki proses yang terlalu

panjang yang seharusnya dapat dipersingkat dan dipermudah jika memiliki suatu sistem informasi yaitu Sistem Informasi Kepegawaian. Dengan adanya sistem Informasi Kepegawaian, selain akan mempermudah di dalam pendataan Pegawai utamanya Tenaga Kontrak, juga akan mampu mempersingkat waktu dan alur di dalam pelaksanaan proses penggajian yang telah diperlihatkan sebelumnya di atas. Penerapan Sistem Informasi Kepegawaian akan sangat membantu di dalam pengelolaan data kepegawaian kedepannya dan juga sebagai tolak ukur di dalam penerapan Sistem Informasi pemerintahan yang transparan dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip dari *Good Governance*.

Berdasarkan analisa yang telah kami berikan sebelumnya, untuk itu kami mengusulkan rancangan atau model Sistem Informasi Kepegawaian (Tenaga Kontrak) berdasarkan pemetaan yang kami buat dari hasil analisa kebutuhan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan. Dalam rancangan ini, kami membuat skema pendataan kepegawaian dan juga alur didalam mempercepat proses dari penggajian yang selama ini dilaksanakan secara manual di Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan.



Gambar 2 : Rancangan Sistem Informasi Kepegawaian (Tenaga Kontrak); (sumber : penulis)

Dalam rancangan Sistem Informasi Kepegawaian tersebut, kami membuat pola rancangan berdasarkan atas kebutuhan bank data yang diperlukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan, selain itu juga rancangan Sistem Informasi ini juga akan menggunakan berbasis web dan mobile (e-government). Dalam aplikasi Sistem Informasi tersebut, selain berisi data-data dari Tenaga Kontrak pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan, juga akan berfungsi sebagai presensi kehadiran online (e-presensi) dan juga sistem penggajian secara online (e-gaji) yang akan memudahkan para Tenaga Kontrak untuk melakukan presensi kehadiran secara online juga akan mempermudah para Tenaga Kontrak di dalam mengurus gaji mereka. SIMPEG-TK (Sistem Informasi Pegawai - Tenaga Kontrak) ini juga akan berguna bagi para PNS utamanya di Sub. Bagian Kepegawaian dan juga pada Sub. Bagian Keuangan. Kegunaan sistem informasi (SIMPEG-TK) ini bagi

Sub. Bagian Kepegawaian, adalah utamanya bagi para PNS dalam hal pendataan pegawai kontrak dan juga didalam melakukan pendataan ulang para pegawai ketika diperlukan selain itu juga di dalam mendaftarkan pegawai baru atau registrasi tahunan BPJS, baik itu BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Pada Sub. Bagian Keuangan, sistem informasi ini juga akan sangat berguna di dalam mempercepat alur gaji yang selama ini menjadi momok yang sangat mengganggu dan merepotkan dikarenakan mengurus waktu dan tenaga di dalam mengurus surat-surat yang diperlukan.

ANALISA SWOT

Dengan adanya analisa SWOT ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang faktor-faktor apa saja yang bisa menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang kira-kira akan terjadi didalam pembuatan Sistem Informasi Kepegawaian Tenaga Kontrak (SIMPEG-TK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan.

Analisa SWOT Sistem Informasi

Berdasarkan penjelasan yang sudah diberikan sebelumnya, analisis SWOT yang kami lakukan didalam merancang sistem informasi ini antara lain sebagai berikut :

A. Strength (kekuatan)

- 1) Sistem informasi ini dirancang berdasarkan kebutuhan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan yang memang memerlukan suatu Sistem Informasi Kepegawaian khususnya untuk Tenaga Kontrak guna pengumpulan data
- 2) Alur proses bisnis didalam Sistem Informasi ini sudah dibuat sedemikian rupa dan didalam perancangannya, mengikutkan komponen kepegawaian secara langsung di dalam tahapan-tahapan alurnya
- 3) Sistem Informasi yang dirancang dibuat sejelas dan seefisien mungkin bagi para admin yang akan mengelola (pada Sub. Bagian Kepegawaian) dan juga memudahkan user yang dalam hal ini adalah Tenaga Kontrak yang akan menggunakan aplikasi SIMPEG-TK ini.
- 4) Proses yang transparan akan memudahkan seluruh pegawai didalam mengawasi bagaimana proses yang akan terjadi dan dapat menjadi bahan monitoring dan evaluasi bagi level pimpinan.

B. Weakness (kelemahan)

- 1) Kurangnya data dan informasi dari segi kepegawaian yang didapat, hal ini dikarenakan data-data para Tenaga Kontrak memang tidak tersimpan sepenuhnya pada dokumen kearsipan Sub. Bagian Kepegawaian
- 2) Kesiapan admin yang akan menangani Sistem Informasi ini baik dalam hal teknis pengoperasian maupun dalam hal permasalahan yang dihadapi akan menjadi sebuah feedback negatif bagi pengembang/perancang sistem informasi

- 3) Belum siapnya para PNS utamanya pada Sub. Bagian Keuangan didalam mengelola sesuatu yang baru (para PNS pada Sub. Bagian Keuangan adalah orang-orang yang sudah berumur dan mungkin akan sulit untuk mempelajari sesuatu yang baru)

C. Opportunities (peluang)

- 1) Belum adanya sistem sejenis di OPD manapun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
- 2) Sistem Informasi yang dirancang saat ini masih bisa dikembangkan lagi kedepannya, seperti pengembangan dalam hal penilaian kinerja tenaga kontrak, mutasi antar Divisi (pindahan tenaga kontrak dari satu Bidang/Sub. Bidang ke Bidang/Sub. Bidang lainnya)
- 3) Dana atau anggaran yang diperlukan didalam merancang Sistem Informasi ini tergolong kecil.
- 4) Mendukung aplikasi pada mobile Phone (IoS/Android)
- 5) Sistem Informasi yang dirancang memenuhi prinsip-prinsip e-government yang dicanangkan pemerintah, yaitu akuntabel dan transparan

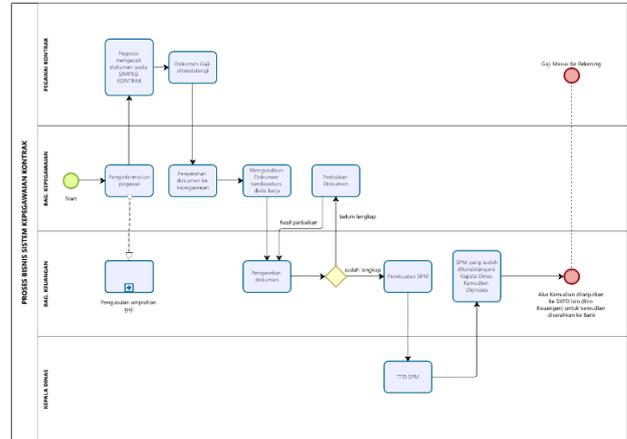
D. Threats (ancaman)

- 1) Belum adanya informasi dari atasan utama (Kepala Dinas) kapan usulan Sistem Informasi ini akan diajukan ke Bupati atau OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang menangani kebutuhan Dinas (misalkan seperti Bappeda, Biro Aset, dll) , sehingga kami belum tau kapan akan diusulkan.
- 2) Internet yang kurang stabil dan juga belum adanya server khusus pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan.
- 3) Ide atau konsep yang dikembangkan cukup umum sehingga dapat menjadi suatu ancaman jika ada pengembang lain yang memiliki dana besar atau pengembang yang memiliki kedekatan dengan pimpinan mengetahui akan rancangan sistem informasi ini
- 4) Belum redanya Pandemi Covid-19 yang mana ini akan menjadi pertimbangan dalam pengalokasian anggaran yang bersumber dari pendapatan daerah. Saat ini anggaran pada organisasi pemerintahan daerah lebih berfokus pada penanganan Pandemi Covid-19 daripada membelanjakan anggaran daerah untuk keperluan yang belum sepenuhnya penting.

Rancangan Proses Bisnis Pada SIMPEG-TK

Berdasarkan pengertian yang dijelaskan diatas, maka dari itu kami telah merancang alur proses bisnis untuk penggajian pada aplikasi SIMPEG-TK yang saat ini sedang dirancang. Desain Proses Bisnis Gaji tersebut menggunakan alur sederhana yang mudah dipahami, sehingga para PNS yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut akan lebih mudah didalam pengecekan, dan juga data-data yang diterima merupakan hasil data yang telah diperiksa dan dimasukkan ke sistem oleh Tenaga Kontrak, dan juga merupakan data yang sudah tervalidasi. Pada gambar 3 yang sudah disediakan

dibawah ini, alur proses bisnis penggajian tersebut merupakan pola yang hampir sama dengan pola penggajian Tenaga Kontrak yang sudah ada, namun dalam prosesnya data kepegawaian akan diinput lebih awal, sehingga tidak ada lagi proses penginputan data berulang dan meminimalisir kesalahan yang terjadi jika dibandingkan dengan pengisian data gaji secara manual.



Gambar 3 : Desain Proses Bisnis Penggajian pada SIMPEG-TK (sumber ; penulis)

Langkah-langkah

1. Bagian kepegawaian akan melakukan penginformasian kepada bagian keuangan terkait pengusulan amprah gaji dan ke pada pe'gawai kontrak
2. Setelah menerima informasi pegawai kontrak melakukan pengecekan data pada SIMPEG KONTRAK
3. Pegawai kontrak akan melakukan proses penandatanganan pada dokumen gaji yang sudah disiapkan
4. Pegawai kontrak yang telah selesai melakukan pendatangan dapat menyerahkan berkas kepada bagian kepegawaian
5. Berkas pegawai kontrak yang di terima akan di urutkan sesuai dokumen berdasarkan divisi kerja
6. Berkas yang sudah selesai di urutkan akan di serahkan kepada bagian keuangan agar bisa di lakukan pengecekan dokumen
7. Hasil pengecekan di bagian keungan jika ada kesalahan data atau kurangnya tanda tangan akan di kembalikan lagi ke bagian kepegawaian
8. Jika hasil pengecekan sudah benar dan lengkap akan di lanjutkan ke proses selanjutnya
9. Hasil yang sudah benar dan lengkap akan di buatkan SPM oleh bagian keuangan
10. Data SPM akan di serahkan ke pada kepala Dinas Pendidikan untuk di tandatangani
11. Hasil data SPM yang di tandatangani akan di serahkan ke bagaian keuangan untuk di lakukaknya pengecekan dan di proses lebih lanjut
12. kemudian di lanjutkan ke bagian SKPD lain (Biro Keuangan)
13. Data yang dari SKPD lain (Biro Keuangan) akan di serahkan ke pada Bank

14. Kemudian pegawai kontrak akan mendapatkan gajinya yang masuk ke rekening masing-masing pegawai kontrak

Skema Penerapan Proses Bisnis Gaji

Berdasarkan skema yang sudah dilampirkan pada gambar 3, terlihat bahwa proses bisnis yang dilakukan untuk proses penggajian terlihat hampir sama seperti yang tertera pada gambar 1. Namun disini sebelumnya sudah ada penginputan dan validasi data kepegawaian yang dilakukan oleh Tenaga Kontrak dan PNS yang menangani kepegawaian melalui aplikasi SIMPEG-TK sehingga asumsi pada proses bisnis ini adalah ketersediaan data sudah mendukung untuk melaksanakan proses penggajian.

Alur proses bisnis untuk penggajian dimulai dari tahapan penginformasian pengisian gaji pada aplikasi oleh Sub. Bagian Kepegawaian yang mana di saat yang bersamaan juga informasi tersebut dikirimkan ke Sub. Bagian Keuangan untuk melakukan proses persiapan. Selanjutnya para Tenaga Kontrak akan mengecek data pada aplikasi SIMPEG-TK dan kemudian melakukan pencetakan dokumen untuk ditandatangani. Dokumen tersebut berupa data gaji, jumlah pembayaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Jumlah Presensi dan potongan lainnya. Dokumen tersebut yang ditandatangani dan diserahkan ke Sub. Bagian Kepegawaian untuk dikumpulkan dan diurutkan sesuai dengan id-pegawai Tenaga Kontrak dan juga Divisinya. Setelah semua dokumen terkumpul dan sudah sesuai dengan Divisi, Sub. Bagian Kepegawaian akan membuat dokumen Pencairan dan Kuitansi Pembayaran berdasarkan Divisi. Dari sini sudah terlihat bahwa jumlah kuitansi dan dokumen yang dibuat akan menjadi lebih sedikit yang akan membantu mempersingkat waktu, selain itu juga kesalahan dalam pembuatan nama sudah tidak lagi menjadi kendala karena sudah sesuai dengan data pada sistem yang tersedia, setelah Kuitansi dan Dokumen Pencairan tersebut selesai, dokumen tersebut kemudian akan diserahkan ke Sub. Bagian Keuangan untuk dilakukan verifikasi dokumen. Dokumen tersebut bila telah sesuai dengan syarat dan ketentuan, jumlah pembayaran dan jumlah potongan maka akan segera dibuatkan SPM berdasarkan Divisi oleh Sub. Bagian Keuangan, namun jika belum sesuai, akan dikembalikan ke Sub. Bagian Kepegawaian untuk direvisi. Dokumen yang sudah dibuatkan SPM kemudian akan diserahkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani. Dokumen yang sudah sepenuhnya siap dan sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas, akan dikembalikan ke Sub. Bagian Keuangan yang mana dokumen ini selanjutnya akan diserahkan ke OPD/SKPD lain guna disiapkan dananya dan diserahkan ke Bank agar dikirim ke masing-masing rekening Tenaga Kontrak yang bekerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan.

Dengan adanya alur proses bisnis tersebut, akan mengurangi anggaran pemerintah dalam hal pengeluaran atk (kertas) dikarenakan dokumen yang tercetak akan jauh lebih sedikit dan juga meminimalisir kesalahan yang terjadi seperti : kesalahan nama, kesalahan tanggal lahir, kesalahan penghitungan potongan dan jumlah gaji yang diterima. Dengan adanya Sistem Informasi ini beserta kejelasan desain proses penggajian ini, akan memudahkan para pegawai PNS yang melaksanakan pekerjaan ini dan juga kemudahan bagi para Tenaga Kontrak di dalam melaksanakan pengajuan gaji.

PENUTUP

Penggajian pada pegawai Kontrak di Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan masih dilakukan secara manual, terlalu berbelit-belit dan memerlukan proses yang sangat panjang. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya Sistem Informasi Kepegawaian untuk Tenaga Kontrak pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan, dan juga model rancangan sistem informasi kepegawaiannya menggunakan sistem manual yang seharusnya dapat dipermudah jika memiliki sistem informasi yaitu sistem informasi kepegawaian. Imbas dari hal tersebut adalah banyaknya data yang hilang atau tidak ditemukan sehingga didalam pembuatan rancangan memerlukan waktu yang cukup lama untuk memproses hal tersebut, selain itu pula dalam kepengurusan gaji akhirnya menjadi suatu problem yang cukup besar karena para pegawai utamanya tenaga kontrak, harus mengusulkan gaji secara manual.

Dengan adanya sistem Informasi Kepegawaian, selain akan mempermudah di dalam pendataan Pegawai utamanya Tenaga Kontrak, juga akan mampu mempersingkat waktu dan alur di dalam pelaksanaan proses penggajian yang telah diperlihatkan sebelumnya di atas. Penerapan Sistem Informasi Kepegawaian akan sangat membantu di dalam pengelolaan data kepegawaian kedepannya dan juga sebagai tolak ukur di dalam penerapan Sistem Informasi pemerintahan yang transparan dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip dari Good Governance.

Menurut kami dengan dibuatkannya sistem informasi kepegawaian yang lengkap disertai dengan alur gaji yang sistematis akan sangat memudahkan para pegawai utamanya penggajian untuk Tenaga Kontrak. Dengan adanya sistem Kepegawaian untuk Tenaga Kontrak ini, diharapkan proses alur gaji yang terjadi selama ini akan mempermudah para pegawai utamanya Pegawai Kontrak yang selama ini selalu terjebak di dalam suatu sistem lama dimana alur yang panjang dan proses yang masih manual menjadi kendala di dalam pengamprahannya.

Adapun saran yang bisa kami berikan antara lain :

1. Seiring dengan perkembangan jaman dan perkembangan Teknologi Informasi/Sistem Informasi, diharapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan lebih tanggap di dalam mengadopsi/mencari ide-ide baru dan juga penerapan teknologi informasi/sistem informasi untuk kemajuan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan. Contohnya dengan adanya rancangan Sistem Informasi Kepegawaian Tenaga Kontrak (SIMPEG-TK) ini, yang mana akan mempermudah proses pendataan data kepegawaian khususnya bagi tenaga kontrak.
2. Sistem Informasi yang dirancang saat ini masih jauh dari kata sempurna. Masih ada beberapa hal yang bisa ditambahkan atau dikurangi demi tercapainya Sistem Informasi yang sesuai dengan kebutuhan Dinas.
3. Dalam makalah ini, tidak membahasakan Sistem Informasi Kepegawaian Tenaga Kontrak (SIMPEG-TK) secara mendetail, kami hanya fokus pada pengembangan Desain Proses Bisnis untuk Penggajian saja dikarenakan, hal tersebutlah yang menjadi fokus utama kami didalam makalah yang kami buat ini.
4. Desain Proses Bisnis Penggajian yang kami sarankan ini masih bersumber dari pemikiran lama atau proses lama (dalam hal ini proses bisnis yang ada saat ini) sehingga masih ada beberapa proses yang mirip dengan yang terjadi saat ini, kedepannya jika sistem sudah berjalan, maka kemungkinan besar akan ditemukan cara-cara baru yang akan jauh lebih mempercepat proses penggajian yang diterapkan.
5. Kami sebagai penulis menyadari sepenuhnya jika makalah ini masih banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, untuk memperbaiki makalah tersebut kami meminta kritik yang membangun dari para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fatta. Hanif, "Analisa Desain & Perancangan Sistem Informasi", Andi, Yogyakarta, 2007
<https://www.dosenpendidikan.co.id/proses-bisnis/> ,
Oleh Dosen Pendidikan 3, Artikel tanggal 05 September 2021, Diakses tanggal 20 Nopember 2021
- Jhon W. Satzinger., Robert B Jakson., Stephen D.Burd
System Analysis and Design in a Changing World., fourth edition. New York : Thomson Course Technology, 2010
- Mcleod, R, Schell, "Sistem Informasi Manajemen". Jakarta: Salemba Empat. 2008.
- Monk, E.F, Bret J. Wagner. Concepts in Enterprise Resource Planning (Third Edition). Jakarta : Salemba Empat. 2009
- Weske, Mathias. Business Process Management: Concept, Languages, Architectures. New York: Springer. 2007
<https://www.linovhr.com/proses-bisnis/> , Oleh Admin LinovHR. 3 Mei 2021
<https://blog.investree.id/bisnis/mengenal-proses-bisnis-beserta-manfaatnya-dalam-usaha/> , Arlyz Savan Religa — 06 Oktober 2021